

2021

RENCANA KERJA



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI BARAT



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Alamat: Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Wing 6 Lt. 2
Jl. Andi Pattana Endeng No. Mamuju, Kode Pos 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis harus di terjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.
- Mengingat :
- a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022
- o) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- p) Peraturan Gubernur No 45 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman berpedoman pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra OPD Tahun 2017-2022, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2021.
- Ketiga : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada poin KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
- Keempat : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, meliputi :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD
 - Bab V : Penutup
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : April 2020

KEPALA DINAS,

A. ACO TAKDIR, S.Sos. M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19670702 199103 1 011

Tembusan : kepada Yth;

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
3. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
4. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
5. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
6. Arsip.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD, dimana isi dokumen tersebut merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan renja OPD mengakomodasi hasil forum multistakeholder OPD dan menjadi masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA OPD, KUA, PPAS dan RAPBD. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020.

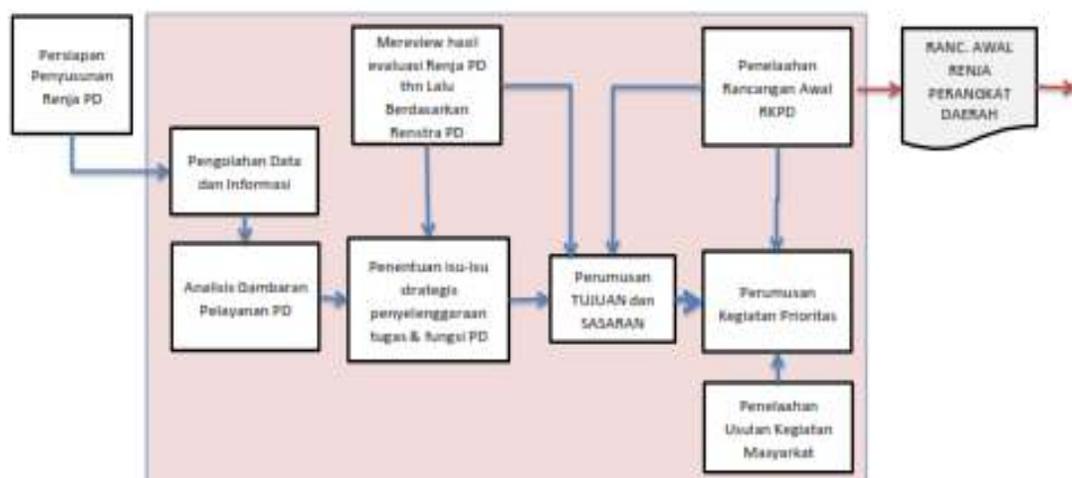
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD.

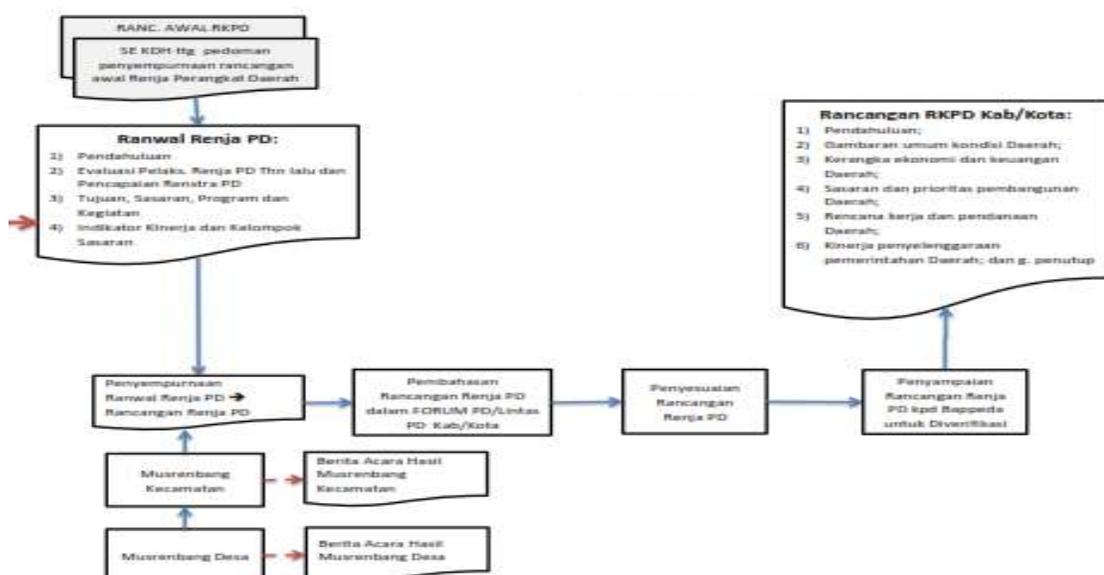
Prinsip-prinsip penyusunan Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. Penyusunan Renja OPD buka merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Substansi rancangan Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikator serta sumber dananya. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Tahapan penyusunan rancangan Renja OPD mencakup persiapan penyusunan rancangan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan

Renstra OPD, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, penelaahan rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan masyarakat dan perumusan kegiatan prioritas. Dalam penyusunan Renja 2021 berpedoman pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra OPD Tahun 2017-2022, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2021. Tema arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2021, yaitu Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Adapun tema arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan 5 prioritas provinsi, antara lain : peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi inklusif, keberlanjutan lingkungan hidup. Pada penyusunan Renja Tahun 2021 merupakan peralihan nomenklatur dari Pemdagri 13 Tahun 2006 yang akan dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun skema penyusunan rancangan Renja OPD pada Gambar 1.1.





Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rancangan renja

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- l) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
- o) Peraturan Gubernur No 45 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sulawesi Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja OPD Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi unit kerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Adapun tujuan

dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 adalah :

- a. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2021 yang mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Merupakan kerangka acuan dalam menentukan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.
- c. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program sesuai dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2021.
- d. Merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA OPD, program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini berisikan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil keluaran pada sistem Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2019. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator Kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan atau implementasi rencana kerja tersebut. Rencana kerja (Renja OPD) tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.

Adapun Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 5.729.539.815,62,- dengan tingkat realisasi capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 5.498.008.000,- dengan persentase sebesar 95,96 %.

Dari hasil evaluasi kinerja Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada Pada Tahun 2020 terdapat kegiatan yang memiliki nilai peringkat kinerja yang sudah sangat tinggi (ST), beberapa hal yang masih kurang disebabkan karena:

1. Adanya pengurangan anggaran (rasionalisasi anggaran) terhadap kegiatan fisik yang belum dilaksanakan sebelum triwulan 4 sehingga capaian kinerja kegiatan yang dilakukan rasionalisasi anggaran tidak tercapai dan tidak adanya perubahan anggaran.
2. Pada Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Expose/Promosi Upaya Penanganan

Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam direncanakan dilaksanakan 2 kali kegiatan expose akan tetapi hanya dilaksanakan 1 kali karena tidak ada event pelaksanaan sehingga pada kegiatan tersebut masih terdapat sisa pagu.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi pendidikan teknis lingkungan yang belum memadai.
4. Sarana dan prasarana lingkungan belum memadai.

Kondisi tersebut berimplikasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % di bulan Desember 2019 ternyata hanya mampu mencapai 95,96%. Untuk mengantisipasi capaian target kinerja program dan kegiatan Tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui diklat teknis dan diklat formal.
2. Penegasan pelaksanaan SOP bagi pegawai struktural dan teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.
3. Membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan.
4. Tetap melengkapi pengadaan sarana prasarana Laboratorium Lingkungan di Tahun 2020.
5. Membuat Rencana Aksi pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2020.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 pada Tabel 2.1 dan Evaluasi Kinerja Tahun Berjalan pada Tabel 2.2.

2.2. CAPAIAN RENSTRA OPD

Renstra OPD merupakan landasan kebijakan strategi lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Periode 2017-2022, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.

Tabel evaluasi capaian RENSTRA OPD 2017-2022 pada Tabel 2.3.

2.3 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 – 2018. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari capaian kinerja pada Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat yang dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan. Berikut Capaian Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan pada Tabel 2.3, 2.4 dan 2.5 Tahun 2012 – 2018.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Pasangkayu	46,67	30,00	55,33	40,00	33,67	55,56	-
Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah	58,33	88,89	66,67	48,33	-	-	-
Kabupaten Majene	100,00	33,33	50,00	50,00	79,00	-	-
Kabupaten Polewali Mandar	96,67	96,67	64,00	42,00	59,33	33,33	-
Kabupaten Mamasa	90,00	100,0	50,00	48,86	53,43	67,14	-
Provinsi Sulawesi Barat	78,33	69,78	57,20	45,84	54,11	52,01	53,20

Tabel 2.6
Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Pasangkayu	99,51	97,71	96,42	99,26	99,64	94,53	-
Kabupaten Mamuju	98.18	97.36	95,46	99,21	99,57	92,29	-
Kabupaten Majene	99.78	98.28	97,85	99,35	98,92	81,91	-
Kabupaten Polewali Mandar	99.44	97.88	97,85	99,23	99,33	88,66	-
Kabupaten Mamasa	99.58	98.59	97,06	99,41	99,61	87,32	-
Kabupaten Mamuju Tengah	-	-	-	-	99,64	90,83	-
Provinsi Sulawesi Barat	99.20	97.43	96,68	99,29	99,45	89,23	90,00

Tabel 2.7
Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pasangkayu	99.51	82.33	65,07	63,48	62,50	62,21	-
Mamuju	98.18	82.97	77,27	76,58	70,27	73,66	-
Majene	99.28	58.55	53,17	50,81	52,48	51,60	-
Polewali Mandar	99.44	34.37	36,56	40,62	40,94	39,37	-
Mamasa	99.58	71.75	66,79	67,29	68,48	66,76	-
Mamuju Tengah	-	-	-	-	82,23	79,41	-
Provinsi Sulawesi Barat	99.20	75.44	66,96	67,28	62,82	62,17	62,08

2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Untuk mencapai penyelenggaraan lingkungan strategis agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Dalam menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD maka dilakukan pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
-1	-2	-3	-4
1	Permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Degradasi lingkungan pada wilayah pesisir	Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap degradasi lingkungan. Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Berdasarkan data, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan diakibatkan Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelolah lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap kawasan ekosistem hutan mangrove di Sulawesi Barat.
2	Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-Sumber Air.	Menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi	Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang alang-alang dan semak belukar. Lahan seperti ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau panjang yang berdampak pada kebakaran hutan. Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras.
3	Permasalahan Pencemaran Lingkungan	Penanggulangan sampah belum optimal	Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan tindakan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat bagaimana mengelola sampah yang baik dengan penerapan sistem 3 R, pengolahan sampah menjadi bahan biogas dll.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Permasalahan Pengembangan generasi lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan	Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bermasa, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda
5	Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	penyelesaian penegakan hukum belum optimal	Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum klasik. Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setia tahunnya. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan. Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Pos Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) sebagai tindak lanjut penyelesaian penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Barat.

Penentuan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan pemetaan yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat 16.787,18 kilometer persegi dengan luas wilayah laut sebesar 20.342 kilometer persegi. Panjang garis pantai barat memanjang dari utara ke selatan sepanjang 677 kilometer dengan jumlah pulau sebanyak 40 pulau. Dari 6 wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, 5 diantaranya berada di daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap degradasi lingkungan. Seperti diketahui, kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dilakukan dengan cara reklamasi pantai. Salah satu contoh adalah proyek pembangunan jalan arteri yang rencananya akan menghubungkan Kantor Gubernur Sulawesi Barat sampai dengan Bandar Udara Tampa Padang, akan melewati beberapa kawasan hutan mangrove. Proyek pembangunan ini secara tidak langsung akan merusak ekosistem mangrove yang ada di perairan Mamuju.

Pada kondisi lain, sebagian nelayan tangkap dalam melakukan penangkapan ikan masih banyak yang menggunakan bom. Kondisi ini berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang di perairan Sulawesi Barat. Catatan-catatan tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara pengeboman. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, tidak menutup kemungkinan akan merusak ekosistem perairan khususnya kekayaan terumbu karang di Sulawesi Barat yang sudah semakin menurun.

Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelolah lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 2.9. Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)			
		Baik	Sedang	Rusak	Total
1	Mamuju	220.245,00	286.450,00	183.555,00	690.250,00
2	Majene	33,58	35,97	2,99	72,54
3	Polewali Mandar	23,90	88,25	205,18	317,33
4	Mamuju Utara	310,15	250,00	294,00	854,15
5	Mamuju Tengah	22,00	21,00	24,50	67,50
Jumlah		220.634,63	286.845,22	184.081,67	691.561,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data diatas, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan mencapai 27 persen dan dalam kondisi sedang mencapai 41 persen sedangkan kondisi baik hanya mencapai 32 persen. Jika total 41 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang ini tidak dipelihara dan dijaga kelestariannya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap kawasan ekosistem hutan mangrove di Sulawesi Barat.

Potensi kekayaan sumber daya alam perairan di Sulawesi Barat jika dikembangkan akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, jika potensi terumbu karang dikembangkan dan dipelihara akan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Sulawesi Barat. Namun pada kenyataannya, luas terumbu karang di Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat kurang. Berdasarkan data yang di himpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, luas terumbu karang di Sulawesi Barat yang tersebar di 5 kabupaten hanya mencapai 9.719,96 hektar dari total luas perairan yang mencapai 20.342 kilometer persegi.

Untuk lebih jelasnya, kondisi terumbu karang di Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.10. Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Kondisi Terumbu Karang (Ha)				
		Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Luas Total
1	Mamuju	600,00	1.066,00	1.934,00	3.600,00	7.735,00
2	Majene	0	0	120,58	287,95	408,53
3	Polewali Mandar	0	477,48	0	371,75	849,23
4	Mamuju Utara	200,07	346,23	250,48	287,95	1.084,73
5	Mamuju Tengah	0	0	36,00	15,00	51,00
Jumlah		800,07	1,889,71	2.220,48	4.274,70	9.719,96

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir berbanding lurus dengan kondisi kurang. Ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Mamuju Utara.

2. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan dan Sumber-Sumber Air.

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis adalah :

- Terjadinya longsor dan letusan gunung berapi.
- Penebangan liar (illegal logging).
- Kebakaran hutan.
- Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berasaskan kelestarian.
- Penataan zonasi kawasan belum berjalan.
- Pola pengelolaan lahan tidak konservatif.
- Pengalihan status lahan (berbagai kepentingan).

Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Luas kawasan hutan adalah seluas 1.092.376 Ha diantaranya 452.032 Ha adalah hutan lindung, 330.700 Ha adalah hutan produksi terbatas 71.859 ha adalah hutan produksi biasa, 214.246 Ha adalah Taman Nasional, 944 Ha adalah Taman Hutan Raya dan 22.597 adalah Luas Hutan Produksi Konversi.

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas

lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras. Berdasarkan buku Sulbar Dalam Angka 2016, data lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam alang-alang dan semak belukar.

Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air. Salah satu faktor pendukung dalam pencadangan sumber daya air adalah kondisi hutan yang masih bagus. Jika hutan sudah rusak dan mengalami kekritisian, maka cadangan sumber air juga secara otomatis akan mengalami pengurangan.

3. Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Sampah kerap kali menimbulkan masalah, menjadi pemicu banjir, pencemaran lingkungan, menyebabkan bau tak sedap, merusak pandangan, dan berbagai macam masalah yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Seperti kita ketahui dan sering kita saksikan dilayar kaca, Beberapa tahun terakhir ini Banjir merupakan salah satu persoalan yang akrab dengan semua Negara di dunia, bahkan yang paling parah, hamper sebagian besar wilayah di Indonesia

merupakan banjir langganan tiap tahun saat datangnya musim penghujan. Adapun pemicu banjir itu selain besarnya curah hujan juga diakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air. Kejadian seperti diatas juga tidak akan menutup kemungkinan bakal terjadi di daerah tidak terkecuali di Sulawesi Barat. Penumpukan sampah di saluran-saluran air menyebabkan pendangkalan kali, tersumbatnya aliran air (drainase), yang pada akhirnya menimbulkan genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir. Selain banjir, dampak yang ditimbulkan dari pola pembuangan sampah sembarangan adalah terjadinya pencemaran air.

Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain pencemaran akibat tata cara pengelolaan sampah yang kurang baik, kegiatan pertambangan juga secara tidak langsung mengakibatkan pencemaran sungai, khususnya kegiatan pertambangan galian sirtu di sungai. Kendaraan yang masuk keluar sungai selain menyebabkan kekeruhan air sungai juga membawa partikel-partikel logam yang menyebabkan pencemaran air sungai.

Hasil perhitungan indeks kualitas air sungai menunjukkan bahwa semua sungai di Sulawesi Barat pada tahun 2016 ini mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun oleh pencemaran dari aktivitas manusia. Seperti contoh di Sungai Mamasa, semua penduduk yang bermukim di sepanjang sungai membuang limbahnya ke sungai khususnya limbah cair rumah tangga. Di samping itu, hewan ternak peliharaan dari warga sepanjang sungai, mengalirkan limbah cairnya langsung ke badan sungai. Proses ini secara tidak langsung mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran dari parameter Fecal Coli dan Total

Coli. Berikut hasil perhitungan indeks kualitas air beberapa sungai wilayah Sulawesi Barat.

Tabel 2.12. Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat

Status	Jumlah sampel	Persen	Bobot	Nilai
Memenuhi	15	0,22	70	15,4
Ringan	48	0,72	50	36
Sedang	4	0,06	30	1,8
Berat	0	0	10	0
Total	67	1	-	53,20

Sumber : Perhitungan IKLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

4. Permasalahan Pengembangan generasi lingkungan

Generasi muda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Secara umum, ada 3 kategori dalam pengelompokan generasi muda berdasarkan umur dan lembaga serta luang lingkup tempat pemuda berada yakni: *Siswa*, usia antara 6 – 18 tahun, masih duduk di bangku sekolah, *Mahasiswa*, usia antara 18 – 25 tahun beradi di perguruan tinggi dan akademi dan *Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi* yaitu mereka yang berusia 15 – 30 tahun keatas.

Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bermasa, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda.

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan. Program pengembangan sekolah adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipatif dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini. Satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang sangat aktif dalam program pengembangan adiwiyata adalah Polewali Mandar. Selain pengembangan sekolah adiwiyata, pembinaan kaum muda melalui gerakan peduli lingkungan masih belum maksimal. Minat kaum muda untuk berkipul bersama dalam kegiatan aksi lingkungan masih sangat kurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbatas.

Program Adiwiyata merupakan sebuah gerakan bersama yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2006, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup secara dini kepada generasi bangsa dimulai dari bangku pendidikan. Data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat hingga tahun 2016 ini, jumlah sekolah peraih penghargaan adiwiyata di Sulawesi Barat baru mencapai 61 sekolah dengan kategori sekolah adiwiyata Provinsi, Nasional dan Kabupaten.

Tabel 2.13. Jumlah Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Jumlah Sekolah
1	Polewali Mandar	24
2	Majene	17
3	Mamuju Utara	11
4	Mamuju	8
5	Mamasa	1
6	Mamuju Tengah	-
Jumlah		61

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Sulbar

5. Permasalahan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan mulai dari Perundang-undangan, Penentuan standar, Pemberian izin, Penerapan dan Penegakan hukum. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat dimaksud adalah Pejabat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup yang disebut PPLH.

Salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Barat adalah tidak tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai kewenangan khusus dalam pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus lingkungan yang muncul setia tahunnya. Sebagai langkah

tindak lanjut, pemerintah mengedepankan tindakan preventif dengan melakukan pendekatan dalam rangka pembinaan.

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Pos Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH). Namun sejak terbentuk, pos layanan pengaduan ini tidak dapat berjalan maksimal karena tidak didukung oleh sumber daya manusia pengelola yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan penanganan kepada seluruh pengaduan lingkungan yang diterima dengan upaya-upaya pendekatan persuasif.

Dari sekian banyak pengaduan yang telah diterima, hingga saat ini belum ada yang diproses hingga penegakan hukum, baik secara administratif maupun secara pidana atau perdata. Namun demikian, kasus lingkungan yang telah ditangani hingga tahap proses di Kepolisian adalah Rencana Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Polewali Mandar yang diduga menyalahi prosedur.

Tabel 2.14. Jumlah Pengaduan Lingkungan Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah Kasus Diterima	Jumlah Kasus Diselesaikan	Persentase Penanganan
1.	Kabupaten Pasangkayu	4	4	100%
2.	Kabupaten Mamuju Tengah	4	4	100%
3.	Kabupaten Mamuju	4	4	100%
4.	Kabupaten Majene	14	14	100%
5.	Kabupaten Polewali Mandar	3	3	100%
6.	Kabupaten Mamasa	1	1	100%

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Prov. Sulbar

Kelima isu tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam rencana program kegiatan dalam rangka menjaga agar pembangunan senantiasa berkelanjutan.

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Draft RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, dan pada visi RPJPD Sulbar 2005-2025, yaitu kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan masyarakat malaqbi. Adapun tema pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 yaitu Pwningktan sumber daya manusia dan daya saing wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah pagu pada rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 11.300.000.000,- Setelah penetapan KUA/PPAS anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 5.570.678.680-. Dengan turunnya pagu maka beberapa kegiatan yang terdapat pada rancangan awal Renja yaitu sebanyak 72 kegiatan, hanya terdapat 49 kegiatan yang masuk dalam Renja Tahun 2020.

2.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat sudah dilaksanakan melalui kegiatan forum OPD dan penjaringan program dan kegiatan masyarakat melalui usulan instansi lingkungan hidup kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan masuk dalam Rencana Kerja Tahun 2020, antara lain : Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, Pengembangan sekolah peduli lingkungan Adiwiyata, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan Bimbingan teknis pengelolaan sampah dan TPA.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	100	OP	1,345,000,000	463,421,000	20	225,000,000	4	21,960,000	6	96,016,000	5	62,974,000	5	44,000,500	20	224,950,500	100	99.978	20	688,371,500	20	51.18	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																			87.50	89.68			15.73	28.88	2.63	
Predikat kinerja																			T	T			SR	SR		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur						255,772,000		28,971,837		50,059,840		113,508,799		56,777,423									
		Pengadaan Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli	Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli	40	Unit	880,000,000	36,130,000	2	34,900,000		0		0	2	34,640,000		260,000	2	34,900,000	100	100	2	71,030,000	5	8.07159	DLH
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	48	Bulan	400,000,000	-	12	13,000,000	3	2,910,000	3	0	3	4,837,000	3	5,233,000	12	12,980,000	100	99.84615	12	12,980,000	25	3.245	DLH
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara	36	Unit	1,150,000,000	185,062,146	6	120,000,000	1	6,611,837	2	37,120,893	2	57,855,399	1	15,617,183	6	117,205,312	100	97.67109	6	302,267,458	16.6667	26.2841	DLH
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	90	Unit	225,000,000	34,722,600	15	25,000,000	7	10,000,000	3	3,000,000	2	706,800	3	8,039,840	15	21,746,640	100	86.98656	15	56,469,240	16.6667	25.0974	DLH
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	60	Bulan	365,000,000	51,089,000	12	37,872,000	3	5,600,000	3	5,238,947	3	12,099,600	3	14,572,400	12	37,510,947	100	99.04665	12	88,599,947	20	24.274	DLH
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60	Bulan	230,000,000	28,900,409	12	25,000,000	3	3,850,000	3	4,700,000	3	3,370,000	3	13,055,000	12	24,975,000	100	99.9	12	53,875,409	20	23.4241	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	97.24			20.67	22.08	4.42	
Predikat kinerja																			ST	ST			SR	SR		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur						42,450,000		-		-		41,985,000		50,000									
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli	400	Pakaian	400,000,000	28,605,440	83	42,450,000		0		0	83	41,985,000		50,000	83	42,035,000	100	99.02238	83	70,640,440	20.75	17.6601	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	99.02			10.38	8.83	4.42	
Predikat kinerja																			ST	ST			SR	SR		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai						161,400,000		68,140,000		18,549,200		8,795,671		58,875,128									
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Kapasitasnya	95	OK	1,600,000,000	161,973,200	20	161,400,000	7	68,140,000	3	18,549,200	1	8,795,671	9	58,875,128	20	154,359,999	100	95.63817	20	316,333,199	21.0526	19.7708	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	95.64			21.05	19.77	19.77	
Predikat kinerja																			ST	ST			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					297,300,000																				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	20	Laporan	605,000,000	111,900,000	4	66,300,000	1	5,084,210	1	4,597,895	1	13,321,506	1	42110000	4	65,113,611	100	98	4	177,013,611	20	29,2584	DLH		
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun	5	Laporan	220,000,000	29,680,000	1	26,800,000		2,744,737		2,800,000		5,600,000	1	15,600,000	1	26,744,737	100	100	1	56,424,737	20	25,6476	DLH		
		Penyusunan RKA/DPA - SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun	10	Dokumen	135,000,000	16,880,476	2	25,700,000	-	2,550,000		6,400,000		5,790,000	2	10,800,000	2	25,540,000	100	99	2	42,420,476	20	31,4226	DLH		
		Penyusunan RKA-P/DPPA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPPA SKPD tersusun	10	Dokumen	135,000,000	16,426,429	2	21,500,000		2,483,553		2,500,000		6,200,000	2	10,300,000	2	21,483,553	100	100	2	37,909,982	20	28,0815	DLH		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana	30	Kabupater	1,030,000,000	136,601,429	6	121,150,000		10,088,158		10,686,316		19,058,440	6	77,310,000	6	117,142,914	100	97	6	253,744,343	20	24,6354	DLH		
		Forum SKPD	Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas	350	Program/kegiatan	450,000,000	31,711,905	70	35,850,000	70	34,204,000		1,600,000		-			70	35,804,000	100	100	70	67,515,905	20	15,0035	DLH		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	98.98			20.00	25.67	4.28			
Predikat kinerja																			ST	ST			SR	SR				
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							120,060,500	5	83,160,500		25,400,000		-		9,650,000											
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta HPSN	1000	Orang	800,000,000	74,293,035	200	60,558,000	200	55,058,000		-		-	3,750,000	200	58,808,000	100	97	200	133,101,035	20	16,6376	DLH			
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA	Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA	12	Kegiatan	1,150,000,000	200,016,983	1	59,502,500		28,102,500	1	25,400,000		-	5,900,000	1	59,402,500	100	100	1	259,419,483	8.33333	22.5582	DLH			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	98.47			14.17	19.60	9.80			
Predikat kinerja																			ST	ST			SR	SR				
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan							2,037,598,778	2	153,981,466		315,058,116		311,817,088		#####											
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Penghargaan kepada masyarakat	10	Kegiatan	1,150,000,000	42,924,141	2	75,400,000		-		-	2	71,846,000			2	71,846,000	100	95	2	114,770,141	20	9,98001	DLH		
		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura	20	kab/kota	1,750,000,000	57,682,500	4	69,839,500		1,430,622		2,000,000	2	28,048,618	2	36,239,300	4	67,718,540	100	97	4	125,401,040	20	7,16577	DLH		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
		Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	85	Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	1,300,000,000	58,789,785	15	85,000,000	1	1,924,641	2	4,500,000	6	36,774,800	6	40,920,000	15	84,119,441	100	99	15	142,909,226	17.6471	10.993	DLH
		Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten	Data Kualitas Air Sungai	18	Sungai	950,000,000	53,184,000	3	750,666,000	1	60,319,000	1	21,620,000		30,521,000	1	611,395,000	3	723,855,000	100	96	3	777,039,000	16.6667	81.7936	DLH
		Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	Meningkatnya kapasitas dan kinerja laboratorium	5	Kegiatan	1,650,000,000	356,183,542	1	114,917,578		-		27,589,450		17,177,578	1	67,259,199	1	112,026,227	100	97	1	468,209,769	20	28.3763	DLH
		Pengelolaan Pos P3SLH	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	50	Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten)	700,000,000	84,128,158	10	80,000,000	1	1,332,536	3	23,194,214	2	14,696,800	4	38,580,000	10	77,803,550	100	97	10	161,931,708	20	23.1331	DLH
		Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel	Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan	5	Dokumen	1,850,000,000	294,209,391	1	238,629,894		51,399,404		43,888,552		60,856,574	1	75,909,500	1	232,054,030	100	97	1	526,263,421	20	28.4467	DLH
		Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan yang terbeli	40	Jenis	5,900,000,000	134,428,160	8	278,000,000		6,500,000	2	27,000,000	2	43,524,800	4	199,473,430	8	276,498,230	100	99	8	410,926,390	20	6.96485	DLH
		Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3	Data hasil pemantauan Limbah B3	5	Dokumen	950,000,000		1	80,000,000		-		105,263		37,569,000		34,600,000	1	75,854,263	100	95	1	75,854,263	20	7.98466	DLH
		Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Data Kualitas Udara	24	Kabupaten	800,000,000		6	93,405,000	2	30,970,000	3	56,945,000		1,948,718		2,720,000	6	92,583,718	100	99	6	92,583,718	25	11.573	DLH
		Bimbingan teknis pengelolaan Limba B3	Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pegawai yang meningkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah B3	160	Orang	600,000,000		30	55,000,000		-	30	45,151,900				9,558,100	30	54,710,000	100	99	30	54,710,000	18.75	9.11833	DLH
		Pengendalian Mutu Hasil Pegujian	Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang tervalidasi	176	Alat	1,000,000,000		44	116,740,806		-	12	25,600,000	2	2,842,200		79,080,102	44	107,522,302	100	92	44	107,522,302	25	10.7522	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																			92	89			20	21	1.87	
Predikat kinerja																			ST	T			SR	SR		
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							388,700,000		71,433,506		100,598,724		90,154,544		119,833,193									
		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	55	Ha	2,000,000,000	726,711,900	1.5	161,700,000		32580000	1.5	72,250,000		9,200,000		42,701,193	1.5	156,731,193	100	96.92714	1.5	883,443,093	2.72727	44.1722	DLH
			Jumlah Dokumen Profil yang tersusun	1	Dokumen	82,000,000	79,639,300	1	-		-						0	-	0		0	79,639,300	0	97.1211	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
		Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Laporan Inventarisasi GRK	5	Dokumen	1,400,000,000		123,833,143	1	109,350,000		1,464,115		17828724		48,379,544	1	40,520,000	1	108,192,383	100	98.94137	1	232,025,526	20	16.5733	DLH	
		Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan	35	Desa Peduli Lingkungan	1,000,000,000		77,205,635	3	117,650,000	1	37,389,391	1	10,520,000		32,575,000	1	36,612,000	3	117,096,391	100	99.52944	3	194,302,026	8.57143	19.4302	DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	98.47			10.43	59.10	19.70					
Predikat kinerja																	ST	ST			SR	R						
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								877,000,000		19,371,246		46,080,000		90,460,500		612,940,188										
		Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan	10	Dokumen	777,000,000		123,583,024	2	52,000,000		7,975,263	1	20,010,000		4,225,000	1	7,660,000	2	39,870,263	100	76.67358	2	163,453,287	20	21.0365	DLH	
		Penyusunan Dokumen Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH Yang tersusun	5	Dokumen	1,820,000,000		134,474,740	1	350,000,000	0	1,630,383		9,800,000		80,625,500	1	213,436,700	1	305,492,583	100	87.2836	1	439,967,323	20	24.174	DLH	
		Evaluasi Penyusunan KLHS	Pelaksanaan evaluasi dokumen KLHS	4	Dokumen	400,000,000			1	75,000,000	0	9,765,600		16,270,000		5,610,000	1	37,980,000	1	69,625,600	100	92.83413	1	69,625,600	25	17.4064	DLH	
		Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Yang dihasilkan dokumen KLHS	2	Dokumen	750,000,000		478,423,000	1	400,000,000	0	-		-		-	1	353,863,488	1	353,863,488	100	88.46587	1	832,286,488	50	110.972	DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	86.31			28.75	43.40	21.70					
Predikat kinerja																	ST	T			SR	SR						
		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut								331,011,136		17,097,464		63,584,872		12,614,616		232,870,000										
		Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan)	87	Ha	9,239,500,000		339,223,771	4	331,011,136		17,097,464		63,584,872		12,614,616	4	232,870,000	4	326,166,952	100	98.53655	4	665,390,723	4.5977	7.20159	DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	98.54			4.60	7.20	7.20					
Predikat kinerja																	ST	ST			SR	SR						
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								359,212,680		21,486,603		141,742,000		30,212,718		137,558,668										
		Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan	Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan	75	Sekolah	2,300,000,000		161,667,273	10	123,950,000	2	12,486,603	3	38,152,000	2	24,062,718	3	47,234,000	10	121,935,321	100	98.3746	10	283,602,594	13.3333	12.3305	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				###	kader																					
		Saka KALPATARU	Jumlah kader Lingkungan hidup yang aktif	5	1,550,000,000			4006	113,900,000		7,000,000		8,380,000		6,150,000	4006	90,324,668	4006	111,854,668	100	98.20427	4006	111,854,668	24.6903	7.21643	DLH
		Expose/Promosi Upaya Penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam	Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	5	2,100,000,000		-	2	121,362,680		2,000,000	1	95,210,000		-	1	97,210,000	50	80.09876	1	97,210,000	20	4.62905	DLH		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		83.33	92.23			29.01	12.09	6.04		
Predikat kinerja																		T	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									5,729,539,815.62		680,387,953		1,019,307,184		1,005,623,961		#####	5,498,008,000								
Total Realisasi									5,498,008,000	95.96																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																		96.59	95.96			17.73	24.29			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																		ST	ST			SR	SR			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :

*) coret yang tidak perlu

*) coret yang tidak perlu

keterangan ; skala Nilai Peringkat Kinerja

91 % < 100 % Sangat Tinggi

76 % < 90 % Tinggi

66 % < 75 % Sedang

51 % < 65 % Rendah

< 50 % Sangat Rendah

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

A.Aco Takdir S.Sos, M.Pd

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19670702 199103 1 011

Disusun,

Mamuju, Desember 2019

KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN DLH

PROVINSI SULAWESI BARAT

ST. FATIMAH B., SE, MM

Pangkat : Penata TK.I

Nip : 19761128 200212 2 007

Tabel 2.2

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran										
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	100	Op	12 Bulan, 20 OP	20 OP	20 OP	100%	20 OP	12 Bulan, 60 OP	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	100	Op	12 Bulan, 20 OP	20 OP	20 OP	100%	20 OP	12 Bulan, 60 OP	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	35	Jenis	12 Bulan, 7 Jenis	9 jenis	9 jenis	100%	0	12 Bulan, 16Jenis	45.71	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang terbeli	235	Jenis	12 Bulan, 47 Jenis	47 Jenis	47 Jenis	100%	47 Jenis	12 Bulan, 141 Jenis	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	10	Bahan Bacaan	12 Bulan, 2 Bahan Bacaan	5 Bahan Bacaan	0 Bahan Bacaan	0%	2 Bahan Bacaan	12 Bulan, 4 Bahan Bacaan	40	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli	35	Jenis	12 Bulan, 7 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	0	12 Bulan, 12 Jenis	34.29	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Terbayarkan	180	Rekening/Bulan	12 Bulan, 36 Rekening/Bulan	36 Rekening/Bulan	36 Rekening/Bulan	100%	36 Rekening/Bulan	12 Bulan, 108 Rekening Bulan	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makan minum yang terbeli	25	Jenis	12 Bulan, 5 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	8 Jenis	12 Bulan, 16 Jenis	64	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang terbeli	25	Jenis	12 Bulan, 5 Jenis	0	0	0%	0	12 Bulan, 5 Jenis	20	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia	72	Bulan	24	12	12	100%	12	48	66.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	72	Bulan	24	12	12	100%	12	48	66.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							82%			52.48	
	Predikat Kinerja							T			R	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	9	Unit	0	0	0	0%	3	3	33.33	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli	40	Unit	12 Bulan, 8 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	12 Bulan, 12 Unit	30	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	90	Unit	15	15	15	100%	15	45	50.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	72	Bulan	24	12	12	100%	12	48	66.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara	36	unit	12	6	6	100%	6	24	66.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor terbeli	23	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	48	Bulan	0	12	12	100%	12	24	50.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	72	Bulan	24	12	12	100%	12	48	66.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							75%			45.42	
	Predikat Kinerja							S			SR	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur										
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli	400	Pakaian	1 Paket, 80 Pakaian	0	0	0%	83	1 Paket, 163 Pakaian	40.75	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli	400	Pakaian	80	83	83	100%	0	163	40.75	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							50%			40.75	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangny										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Kapasitasnya	95	Ok	12 Bulan, 15 OK	20Ok	20Ok	100%	7	Ok	44.21	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Peraturan Perundang - undangan terbaru yang di sosialisasi	4	Peraturan Perundang - undangan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							50%			22.11	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana	30	Kabupaten	1 Tahun, 6 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Kabupaten	100%	6	Kabupaten	60.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun	11	Dokumen	3	2	2	100%	2	7	63.64	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD tersusun	2	Dokumen	1	0	0	0%	0	1	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPA SKPD tersusun	11	Dokumen	3	2	2	100%	2	7	63.64	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun	5	laporan	1	1	1	100%	1	3	60	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Forum SKPD	Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas	350	Program/kegiatan	70	70	70	100%	70	210	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	20	Laporan	12 Bulan, 4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Bulan, 12 Laporan	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	8	Dokumen	0	0	0	0%	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							75%			52.16	
	Predikat Kinerja							S			R	
6	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan										
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan)	113.21	Ha	30.21	7.1	4	56%	2	36.21	31.98	Dinas Lingkungan Hidup
		Inventarisasi data dan pembuatan peta kerusakan	1	Dokumen & Peta	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kelompok masyarakat pelestari lingkungan yang dibina	5	Kelompok masyarakat pelestari mangrove	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							56%			31.98	
	Predikat Kinerja							R			SR	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah diwilayah Provinsi										
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat										
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA	Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA	400	Orang	200	50	50	100%	0	250	62.50	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dihasilkan	2	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta HPSN	1000	Orang	400	200	200	100%	200	800	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan	Jumlah aparatur dan masyarakat yang terbina dalam pengelolaan sampah terpadu	210	OK	0	0	0	0	120	120	57.14	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARANAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pengawasan sampah terpadu	1	Dok	0	0	0	0	1	1	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan dan Pengembangan sarana prasana teknologi pengelolaan sampah	Jumlah Unit pengelolaan sampah	4	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							40%			59.93	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
9	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA										
		Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional										
		Penetapan Hak MHA	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan program sekolah peduli lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan	85	Sekolah	25	10	10	100%	15	50	58.82	Dinas Lingkungan Hidup
	Expose/Promosi upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam	Upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam yang di Expose/promosikan	10	Ekspose	0	2	2	100%	2	4	40	Dinas Lingkungan Hidup
	Saka Kalpataru	Jumlah kader lingkungan hidup yang aktif	16,225	kader lingkungan Hidup	0	4006	40	1%	4006	4046	24.94	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Kalpataru	50	Ok	0	0	0	0	25	25	50.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir	1	Dokumen	0	0	0	0	1	1	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Penetapan Hak MHA	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	DLH
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							50%			68.44	
	Predikat Kinerja							SR			S	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPDP TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPDP TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPDP TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan										
		Laporan Inventarisasi GRK										
		Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi										
	Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan pengelolaan Kehati daerah yang dihasilkan	4	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Pemantauan Perlindungan sumber daya alam	2	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan pengembangan sistem informasi kehati	Konservasi Kehati Daerah	6	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan sistem informasi kehati	10	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan kritis	Jumlah Data kerusakan wilayah tambang	4	Dok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan	Jumlah Penetapan kebijakan pengelolaan Sumber daya alam	5	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Gerakan Pembaharuan Sulbar Hijau (GPSH)	Penambahan Tutupan Lahan dengan Tanaman Produktif	35.4	Ha	35.4	0	0	0	0	35.4	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	jumlah titik daerah tangkapan air	2200	Titik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		jumlah titik konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air	11	titik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Laporan Inventarisasi GRK	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	DLH
	Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim)	Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan	35	Desa Peduli Lingkungan	1	3	3	100	7	11	31.43	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Komite Lingkungan Hidup	28	KomiteLingkungan	0	0	0	0	7	7	25.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data GRK dan Proklam	1	Dokumen	1	0	0	0	0	1	100	DLH
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	109.4	Ha	47.67	1.5	1.5	100	2	51.17	46.77	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Profil Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Dokumen kerusakan sumber-sumber air	1	dokumen	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							60.00			47.64	
	Predikat Kinerja							R			SR	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
13	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air										
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara										
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani										
		Jumlah Limbah B3 yang dikelola										
		Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi										
		Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi										
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup										
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA	Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura	20	Kab/Kota	4	4	4	100	4	12	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemberian Penghargaan Lingkungan	Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	1	kegiatan	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan	Penghargaan kepada masyarakat	1000	Orang	200	200	200	100	200	600	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten	Data Kualitas Air Sungai	20	Sungai	4	3	3	100	5	12	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Data Kualitas Udara	24	Kab	0	6	6	100	6	12	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Air Laut	Data Kualitas Air laut	25	kab	0	0	0	0	5	5	20	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Data Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup	46	Perusahaan	9	0	0	0	5	14	30.43	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Pengrusakan LH yang dihasilkan	2	Dokumen Pergub	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Pos P3SLH	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	56	Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten)	16	10	10	100	10	36	64.29	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH	Jumlah SDM Aparatur, Stakeholders dan Masyarakat ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH	480	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan Tekis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM Aparatur ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara penyelesaian sengketa LH	225	Ok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani	4	sengketa lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	85	usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	10	15	15	100	20	45	52.94	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup	50	OK (PPLH dan Calon PPLH)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penegakan hukum lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas dan Penanganan dalam penegakan hukum lingkungan hidup	6	Kegiatan	1	0	0	0	0	1	16.67	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	Meningkatnya kapasitas kinerja Laboratorium	50	Orang	20	10	10	100	0	30	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan yang terbeli	40	Jenis	8	9	9	100	0	17	42.5	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	1	paket	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Pengendalian Mutu Hasil Pengujian	Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang tervalidasi	176	Alat	0	44	44	100	44	88	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel	Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan	5	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dari kegiatan laboratorium	PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dari kegiatan laboratorium yang tersusun	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah Aparatur, SDM dan Stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium	200	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH	Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang dihasilkan	5	Dokumen	1	1	1	100	0	2	40.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbina	25	Komisi Penilai Amdal Daerah	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Anggota Komisi Yang terbina	35	OK	35	35	35	100	0	35	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dimonitoring dan dievaluasi	10	Komisi Penilai Amdal	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan	Jumlah KPA yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan	280	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL-RPL	Jumlah KPA dan pemrakarsa usaha/ kegiatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Evaluasi Laporan RKL-RPL	60	OK	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan RKL-RPL di Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan RKL-RPL di	4	Dok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Pergub Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Pergub Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan	3	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3	Data hasil pemantauan limbah B3	4	Dok	0	1	1	100	1	2	50	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SARANAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RPKD TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3	Jumlah Dokumen Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3	4	Dok	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pe- gawai yang meningkat pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah B3	120	OK	0	30	30	100	0	30	25	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							100			74.42	
	Predikat Kinerja							ST			S	
15	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi										
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah papan Informasi Lingkungan yang terpasang	400	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sistem informasi lingkungan	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan PDRB Hijau	Jumlah Dokumen PDRB Hijau Sulawesi Barat yang dihasilkan	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Dokumen SLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan	2	Dokumen	2	0	0	0	0	2	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan	10	Dokumen	2	2	2	100	2	6	60	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Yang dihasilkan	1	dokumen	1	0	0	0	0	1	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Evaluasi Penyusunan KLHS	Pelaksanaan Evaluasi Dokumen KLHS	4	Dokumen	0	1	1	100	1	2	50	
	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA dan LH)	Jumlah dokumen NSDA dan LH	2	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH	5	dokumen	0	1	1	100	1	2	40	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH	3	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan PPLH	10	Dokumen	0	0	0	0	1	1	10	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							100			60	
	Predikat Kinerja							ST			R	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2018(TAHUN n-3)	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2020 (TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	REALISASI RKPd TAHUN 2019 (TAHUN n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEG. S/D THN 2020 (THN BERJALAN/n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2020(%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
17	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan Indeks Kualitas Udara										
		Tersedianya Ruang Terbuka Hijau										
	Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Pemeliharaan (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	10	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah titik RTH yang terpelihara	7	Titik	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH	4	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Rata rata capaian kinerja							0%			0%	
	Predikat Kinerja							SR			SR	
TOTAL												

Mengetahui,
Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19670702 199103 1 011

keterangan ; skala Nilai Peringkat Kinerja
91 % < 100 % Sangat Tinggi
76 % < 90 % Tinggi
66 % < 75 % Sedang
51 % < 65 % Rendah
< 50 % Sangat Rendah

Disusun,
Mamuju, Februari 2020
KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN DLH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Hi. ST. FATIMAH B., SE. MM
Pangkat : Pembina
Nip : 19761128 200212 2 007

**TABEL 2.3. EVALUASI RENSTRA OPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program	Tingkat Capaian Realisasi	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	Belanja Langsung											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%	DLH
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarkan	12	Bulan	12	12	12	100%	36 Rekening/Bulan	24 Bulan, 36 Rekening Bulan	200%	DLH
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pelaksanaan ATK yang terbeli	12	Bulan	12	12	12	100%	47 Jenis	24 Bulan, 24 Jenis	200%	DLH
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah pelaksanaan barang Cetak dan Penggandaan yang terbeli	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%	DLH
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12	Bulan	0	12	12	100%	12	24	200%	DLH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli	12	Bulan	12	12	12	100%	7 Jenis	24 Bulan, 7 Jenis	200%	DLH
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga yang terbeli	12	Bulan	12	12	12	100%	7 Jenis	24 Bulan, 7 Jenis	200%	DLH
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Pelaksanaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	12	Bulan	12	12	12	100%	2 Bahan Bacaan	24 Bulan, 2 Bahan Bacaan	200%	DLH
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan makan minum	12	Bulan	12	12	12	100%	5 Jenis	24 Bulan, 5 Jenis	200%	DLH
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Pelaksanaan perjalanan luar daerah	12	Bulan	12	12	12	100%	20 OP	24 Bulan, 20 OP	200%	DLH
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Pelaksanaan perjalanan dalam daerah	12	Bulan	12	12	12	100%	20 OP	24 Bulan, 20 OP	200%	DLH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Pengadaan Meubeleur	jumlah pelaksanaan Meubeleur terbeli	12	Bulan	12	12	12	100%	8 Jenis	24 Bulan, 8 Jenis	200%	DLH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara	6	Unit	1 Tahun	6	6	100%	6	1 Tahun, 12 Unit	200%	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPDP Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program	Tingkat Capaian Realisasi	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	15	Unit	1 Tahun	15	15	100%	15	1 Tahun, 30 Unit	200%	DLH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%	DLH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	12	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%	DLH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli	1	Paket	1 Tahun	1	1	100%	80 Pakaian	1 Tahun, 1 Paket, 80 Pakaian	100%	DLH
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli	0	0	0	0	0	0%	80 Pakaian	80 Pakaian	0%	DLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pelaksanaan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12	Bulan	12	12	12	100%	15 Ok	24 Bulan, 15 Ok	200%	DLH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1	Laporan	1	1	1	100%	4	6	600%	DLH
	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD tersusun	1	Dokumen	-	1	1	100%	0	1	100%	DLH
	Penyusunan RKA/DPA - SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun	2	Dokumen	1	2	2	100%	2	5	250%	DLH
	Penyusunan RKA-P/DPPA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPPA SKPD tersusun	2	Dokumen	1	2	2	100%	2	5	250%	DLH
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja program dan kegiatan SKPD	1	Tahun	-	1	1	100%	6 Kabupaten	1 Tahun, 6 Kabupaten	100%	DLH
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	-	-	-	0%	1 Laporan	1 Laporan	0%	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPd Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPd Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program	Tingkat Capaian Realisasi	
	Forum SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas	0	0	-	-	-	0%	70 Program/Kegiatan	70 Program/Kegiatan	0%	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terjalannya Koordinasi Penilaian kota sehat/Adipura	4	kab/kota	4	4	4	100%	4	12	300%	DLH
	Pengelolaan Pos P3SLH	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	6	Pengaduan	6	6	6	100%	10	22	367%	DLH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Paket	1	1	1	100%	-	2	200%	DLH
	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas dalam penegakan hukum lingkungan hidup	1	Kegiatan	-	1	1	100%	-	1	100%	DLH
	Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten	Tersedianya Data Kualitas Air Sungai	2	Sungai	-	2	2	100%	2	4	200%	DLH
	Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Laboratorium	1	Kegiatan	-	1	1	100%	1	2	200%	DLH
	Permantauan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup (PROPER)	Data Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup	4	kab/kota	4	4	4	100%	5	13	325%	DLH
	Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Penguji Sampel	Jumlah Dokumen Data Hasil Uji Lingkungan	0	0	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	DLH
	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Yang Terbeli	0	0	-	-	-	0%	8 Jenis	8 Jenis	0%	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Jumlah Anggota Komisi yang Terbina	0	0	-	-	-	0%	35 Ok	35 Ok	0%	DLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam											
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Konservasi Kehati Daerah	1	Kegiatan	1	1	1	100%	0	2	200%	DLH
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Kegiatan	1	1	1	100%	0	2	200%	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun (Tahun n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2017 (Tahun n - 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program	Tingkat Capaian Realisasi	
	Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH	Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang dihasilkan	1	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	300%	DLH
Program Inventarisasi Data dan Informasi Sumber Daya Alam												
	Penyusunan SLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan	2	Dokumen	2	2	2	100%	2	6	300%	DLH
	Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Yang Tersusun	1	Dokumen	-	1	1	100%	-	1	100%	DLH
	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun	0	0	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	DLH

BAB III**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sesuai dengan 5 arahan utama Presiden, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyerdehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Adapun agenda pembangunan/prioritas Nasional, sebagai berikut :

- Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan.
- Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Untuk mendukung tercapainya prioritas nasional maka Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyusun arah kebijakan dengan 2 kerangka besar yaitu Mengurangi beban lingkungan; dan Aktualisasi potensi SDH untuk mendukung sumbangan sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sebagaimana pada tahun 2019 ditargetkan IKLH sebesar 66,5- 68,5 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKPD, melalui penyusunan

rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta sinergi antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (korelasi) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD), sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, isu-isu strategis RPJPD Sulbar 2005-2025 dan isu-isu strategis dan penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun tema pembangunan daerah Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2021 adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Tujuan rencana kerja disusun untuk menjabarkan lebih lanjut visi dan misi yang disusun lebih detail, realistis dan dilengkapi oleh sasaran yang terukur dan dapat dicapai pada periode yang direncanakan. Tujuan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, yaitu meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam renja 2021, yaitu : Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara

Dan Meningkatkan Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis Dan Sumber-Sumber Air.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 berdasarkan pada Perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Perubahan Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan. Arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 salah misi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Misi V menodorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja yang akan dicapai dalam misi V adalah Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan Penurunan Lahan Kritis. Selain berpedoman pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, penyusunan program kegiatan Tahun 2021, didasarkan pada target capaian SDGs dan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksanaan kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka EKPPD. Berdasarkan pada aplikasi simda perencanaan pada Tahun 2021 terdapat 11 program yang akan dilaksanakan, yang akan dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan 12 program, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Program Pengelolaan dan Rehabilitas ekosistem pesisir dan laut
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
11. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dari 12 program diatas, diturunkan menjadi 58 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun kegiatan dimaksud antara lain:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pengadaan Meubeleur
14. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
16. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
20. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
21. Pendidikan dan Pelatihan Formal
22. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25. Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD
26. Penyusunan RKA/DPA-SKPD
27. Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
28. Monitoring dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan SKPD
29. Penyusunan dokumn perencanaan SKPD
30. Forum SKPD
31. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
32. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA
33. Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengeolaan persampahan
34. Penyediaan dan Pengembangan sarana prasana teknologi pengelolaan Sampah
35. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
36. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
37. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
38. Inventarisasi Usaha/Kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH
39. Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
40. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
41. Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten
42. Pemantauan Kualitas Air Laut
43. Peningkatan kapasitas dan kinerja labolatorium
44. Pengelolaan POS P3SLH

45. Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan
46. Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah
47. Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3
48. Bimbingan teknis pengeolaan Limbah B3
49. Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3
50. Pemantauan RKL-RPL di Daerah
51. Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL – RPL
52. Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan
53. Sosiasasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan
54. Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel
55. Pengendalian Mutu Hasil Pengujian
56. Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup
57. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
58. Pemantauan Kualitas Udara Ambien
59. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
60. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
61. Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting
62. Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
63. Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
64. Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)
65. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan pengembangan sistem informasi kehati
66. Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan kritis
67. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
68. Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat
69. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup (RPPLH)
70. Evaluasi Penyusunan KLHS
 71. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA dan LH)
 72. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 73. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
 74. Penataan RTH
 75. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
 76. Pengembangan Program Sekolah Peduli Lingkungan
 77. Saka KALPATARU
 78. Expose/Promosi Upaya Penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam
 79. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun jumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, yaitu 11 Program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Adapun kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, sebagai berikut ;

1. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum
4. Administrasi Keuangan
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
6. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
7. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
10. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
11. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
13. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
14. Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
15. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
16. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
17. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL. 4. 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	4	3,165,916,750			4	2,880,710,000
			Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DLH	62%	199,328,400			62%	5,840,655,685
			Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	72%	795,450,000			72%	827,450,000
1.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD	88	644,491,000			89.85	330,000,000
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang tersusun	2	114,712,380	DAU		2	50,000,000.00
1.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4	89,999,840	DAU		4	75,000,000.00
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Provinsi, 6 Kabupaten	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	4	99,999,920	DAU		4	75,000,000.00

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	72	89,999,840	DAU		72	80,000,000.00
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	6		249,779,020	DAU		6
1.2	Administrasi Keuangan		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DLH	90%	99,999,920			90%	5,690,655,685
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup DLH	90%	99,328,480			95%	150,000,000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	1		DAU		1	5,615,655,685.00
1.2.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	3	99,999,920	DAU		3	75,000,000.00
1.2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun	12	49,664,240	DAU		12	75,000,000.00
1.2.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun	1	49,664,240	DAU		1	75,000,000.00
1.3	Administrasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DLH	90%	2,521,425,750.00			95%	2,550,710,000.00
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	250	70,000,000	DAU		250	95,000,000.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	36	153,675,200	DAU		36	120,000,000.00
1.3.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	47	74,999,740	DAU		47	75,000,000.00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak	36	10,000,000	DAU		36	18,000,000.00
1.3.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	9,999,700	DAU		5	10,000,000.00
1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan	1	156,785,750.00	DAU		1	15,000,000.00
1.3.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	30,020,000	DAU		5	50,000,000.00
1.3.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	5	17,270,000	DAU		5	36,000,000.00
1.3.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan	6	74,987,000	DAU		6	81,420,000.00
		Provinsi	Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan	6		DAU		6	50,000,000.00
1.3.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah	20	349,999,560	DAU		20	399,500,000.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.3.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah	25	299,428,800	DAU		25	300,000,000.00
1.3.12	Pengadaan Mobil Jabatan	Provinsi	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	1	476,100,000	DAU		1	500,000,000.00
1.3.13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	4	149,980,000	DAU		4	500,000,000.00
1.3.14	Pengadaan Mebeleur	Provinsi	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	5	184,412,000	DAU		3	37,000,000.00
1.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	2	99,888,000	DAU		2	13,040,000.00
1.3.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Provinsi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan	6	189,560,000	DAU		6	170,000,000.00
1.3.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	15	49,326,000	DAU		15	48,750,000.00
1.3.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	4	74,994,000	DAU		4	16,000,000.00
1.3.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4	50,000,000	DAU		4	16,000,000.00
1.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup DLH	100%	191,250,000.00			100%	191,250,000.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH	100%	604,200,000.00			100%	636,200,000.00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	85	63,750,000.00	DAU		85	63,750,000.00
1.4.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Provinsi	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	85	63,750,000.00	DAU		85	63,750,000.00
1.4.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Provinsi	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan	85	63,750,000.00	DAU		85	63,750,000.00
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi, Luar Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	55	325,000,000.00	DAU		55	447,000,000.00
1.4.5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	50,000,000.00	DAU		100%	5,000,000.00
		Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	55	89,600,000.00	DAU		55	89,600,000.00
1.4.6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	50,000,000.00	DAU		100%	5,000,000.00
		Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55	89,600,000.00	DAU		55	89,600,000.00

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase ketersediaan Dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	1,232,226,820			100%	1,319,340,000
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun	4 Dokumen	1,133,827,880			4 Dokumen	968,930,000
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Yang tersusun	2 Dokumen	545,863,060	DAU		2 Dokumen	-
2.1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi	Jumlah DIKPLH dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen	137,999,280.00	DAU		2 Dokumen	368,930,000.00
		Provinsi	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	350,000,000.00	DAU		1 Dokumen	200,000,000.00
		Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	20 Orang	99,965,540	DAU		20 Orang	400,000,000.00
2.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji oleh provinsi	4 KLHS	98,398,940			4 KLHS	350,410,000
2.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi	Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Divalidasi	2 KLHS	98,398,940	DAU		2 KLHS	350,410,000.00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	50%	636,085,760			59%	1,157,508,000.00

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	20 Usaha/Kegiatan	636,085,760			20 Usaha/Kegiatan	1,157,508,000
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi	Jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	120 Orang	136,087,100	DAU		120 Orang	353,710,000.00
3.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Lingkungan Hidup	30 Orang	199,998,660	DAU		30 Orang	353,710,000.00
3.1.3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	6 Kabupaten	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi oleh pemerintah Provinsi	40 Usaha/Kegiatan	300,000,000	DAU		40 Usaha/Kegiatan	450,088,000.00
4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	100%	624,753,180			100%	1,121,640,000
4.1	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah Pengaduan yang tertangani	10 Pengaduan	624,753,180			10 Pengaduan	1,121,640,000
4.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	6 Kabupaten	Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	10 Pengaduan	224,755,860	DAU		10 Pengaduan	459,040,000.00
		Provinsi, 6 Kabupaten	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	120 Orang	199,998,660	DAU		120 Orang	308,890,000.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Tata Cara Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	30 Orang	199,998,660	DAU		30 Orang	353,710,000.00
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase peningkatan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati Sulawesi Barat	100%	742,299,240			100%	550,000,000
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah pengelolaan kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola Provinsi	5	742,299,240			5	550,000,000
5.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Kehati	1 dokumen Profil Kehati	249,997,600	DAU		1 dokumen Profil Kehati	150,000,000.00
5.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	6 Kabupaten	Jumlah Demplot kehati	7 Demplot kehati	492,301,640	DAU		7 Demplot kehati	400,000,000.00
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pij (Indeks Pencemar) yang memenuhi baku mutu	67%	11,841,707,440			67%	4,600,000,000
			Persentase kabupaten IKU diatas nilai 90	67%	585,062,266			67%	585,062,266
			Cakupan peningkatan Tutupan Lahan	30	1,825,283,300			30	1,600,000,000

RENJA DLH PROV. SUL-BAR TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6.1	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik pengujian yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	16	585,062,266			16	585,062,266
			Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu	78%	9,791,707,440			78%	2,750,000,000
6.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi, 6 Kabupaten	Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup	14	7,200,000,000	DAU		14	400,000,000.00
		Polewali, Mamuju	Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya	2	541,707,440	DAU		2	500,000,000.00
6.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Kabupaten	Jumlah kampung iklim	7 Kampung Iklim	435,062,266	DAU		7 Kampung Iklim	435,062,266
		Provinsi	Jumlah Laporan Inventarisasi GRK	Profil Emisi Persektor	150,000,000	DAU		Profil Emisi Persektor	150,000,000
			Persentase Peningkatan Bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon	50%		DAU		50%	
6.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase parameter yang terakreditasi	12	2,050,000,000			12	1,850,000,000
6.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi, 6 Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi	150 Dokumen	600,000,000.00	DAU		150 Dokumen	550,000,000.00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pada Masyarakat								
		Provinsi	Jumlah sarana prasarana pengujian laboratorium	1	200,000,000.00	DAU		1	
		Provinsi	Jumlah ruang lingkup pengendalian mutu yang tervalidasi	30	1,000,000,000.00	DAU		30	1,000,000,000.00
		Provinsi	Jumlah pengelola laboratorium yang ditingkatkan kapasitasnya	14	250,000,000.00	DAU		14	300,000,000.00
6.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan kondisinya	30	1,825,283,300			30	1,600,000,000
6.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pasangkayu, Polewali, Majene, Mamuju, Mamasa	Luas wilayah yang direhabilitasi	20	1,343,191,500	DAU		20	1,000,000,000.00
		Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan	2	482,091,800	DAU		2	600,000,000.00
7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase limbah B3 yang terkelola	1.13%	523,238,600			1.13%	500,000,000
7.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah titik pengumpulan limbah B3	8	523,238,600			8	500,000,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi dan 6 Kabupaten	Jumlah Limbah B3 yang terkelola	23,3513 ton	523,238,600	DAU		23,3513 ton	500,000,000.00
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Penanganan Sampah	55,5%	1,559,726,620			55,5%	1,450,000,000
8.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional		Volume timbulan sampah yang tertangani/terkelola	74.900,77 Ton	1,559,726,620			74.900,77 Ton	1,450,000,000
			Jumlah sarana prasarana penanganan sampah TPA	1				1	
8.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Mamuju	Jumlah dokumen kebijakan Penanganan sampah	1	349,889,520	DAU		1	350,000,000.00
8.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	6 Kabupaten	Jumlah titik penanganan sampah TPA	4	409,889,520	DAU		4	400,000,000.00
		Mamuju, Polewali, Majene, Mamasa, Mamuju Tengah	Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan sampah	200 Ok	799,947,580	DAU		200 Ok	700,000,000.00
9	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		persentase MHA yang diakui	33%	321,770,484			33%	321,770,484

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang diakui	1	321,770,484			1	321,770,484
9.1.1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi dan 6 Kabupaten	Jumlah MHA teridentifikasi terkait PPLH	3	321,770,484	DAU		3	321,770,484
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan	100	968,551,880			100	968,551,880
10.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan pilot project	3	968,551,880			3	968,551,880
10.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH	200 Orang	250,000,000.00	DAU		200 Orang	250,000,000.00
10.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi, Pasangkayu, Mamasa, Mamuju	Jumlah kader sakakalpataru yang terlatih	4000	188,044,080	DAU		4000	188,044,080
		6 Kabupaten	Jumlah sekolah peduli lingkungan	10 Sekolah	530,507,800	DAU		10 Sekolah	530,507,800

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Indikator	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Cakupan penerima penghargaan lingkungan	10	508,716,260			10	508,716,260
11.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kabupaten penerima penghargaan ADIPURA	1	150,000,000			1	150,000,000
			Jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi	1	358,716,260			1	358,716,260
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi (Pasangkayu)	Jumlah titik pemantauan ADIPURA	4	150,000,000.00	DAU		4	150,000,000.00
		Provinsi, Pasangkayu, Mamuju Tengah	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER	8	104,873,260	DAU		8	104,873,260
		Polewali	Jumlah penghargaan PPLH yang dibagikan pada peringatan HLH	4	253,843,000	DAU		4	253,843,000
						25,530,117,000			24,231,404,575

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berpedoman pada Draft RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan isu-isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 serta RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021. Adapun arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2021 adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan menjadi acuan dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.